

**BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH  
KABUPATEN MOJOKERTO**

**RANCANGAN AKHIR  
RENCANA KERJA  
TAHUN ANGGARAN 2023**

Jalan Raya Jabon No. 188 Mojoanyar  
Telp : (0321) – 325470  
Email : [bpbpmojokertokab@gmail.com](mailto:bpbpmojokertokab@gmail.com)  
Website : [bpbp.mojokertokab.go.id](http://bpbp.mojokertokab.go.id)

## KATA PENGANTAR

Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi. Penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko dan dampak bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut meliputi tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 memberikan gambaran tentang kebijakan, program dan kegiatan serta pagu dana indikatif selama satu tahun ke depan, yang diharapkan dapat memberikan pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto dalam menunjang kebijakan dan program Pemerintah Kabupaten Mojokerto khususnya di bidang penanggulangan bencana.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan ridha dan barokah-Nya serta selalu membimbing, menjaga dan memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita semua sehingga Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 ini dapat diimplementasikan secara konsisten dan berkesinambungan dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, bersih dan berwibawa, sehingga bisa memberikan manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat Kabupaten Mojokerto. Amin ya robbal alamiin.

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i	
Daftar Isi	ii	
Daftar Tabel	iii	
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Landasan Hukum	1
1.3	Maksud dan Tujuan	3
1.4	Sistematika Penulisan	3
<b>BAB II</b>	<b>HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU</b>	<b>5</b>
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	5
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	25
2.3	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	30
2.4	Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD	21
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	34
<b>BAB III</b>	<b>TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>35</b>
3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	35
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	36
3.3	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	36
<b>BAB IV</b>	<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>64</b>
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	<b>80</b>
5.1	Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	80

## DAFTAR TABEL

1.	Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2020 Kabupaten Mojokerto	6
2.	Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Kabupaten Mojokerto	14
3.	Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto	26
4.	Tabel 2.4	Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Mojokerto	32
5.	Tabel 2.5	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan TA. 2022 Kabupaten Mojokerto	34
6.	Tabel 3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Prakiraan Maju Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Mojokerto	41
7.	Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto	65



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang disusun dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Adapun proses penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi persiapan penyusunan Renja, penyusunan rancangan awal Renja, penyusunan rancangan Renja, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir Renja dan penetapan Renja.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah selalu berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Berkaitan dengan penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, Renja ini merupakan langkah untuk melaksanakan mandat yang diemban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto.

### **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 adalah :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat (1) : “Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif”;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
15. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mojokerto 2012 – 2032;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 Nomor 14);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat



Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 6);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor ..... Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun 2023;
34. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 82 Tahun 2015 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 dimaksudkan agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto mampu menjawab tuntutan lingkungan yang berkenaan dengan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, tanggap darurat bencana, pemenuhan kebutuhan logistik serta penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sehingga mampu dan eksis dalam rangka meningkatkan kinerja profesional.

Adapun tujuan disusunnya Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai arah dan pedoman bagi upaya penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Mojokerto di bidang penanggulangan bencana, sehingga para pelaksana dan pemangku kepentingan pembangunan daerah dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pembangunan daerah sehingga pembangunan di Kabupaten Mojokerto sesuai dengan perencanaan, serta dapat berhasil sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Dokumen Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 disusun dengan tata urut sebagai berikut :

#### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto.

#### **Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu**

Bab ini memuat kajian (reviu) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD

tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

### **Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

Bab ini berisikan perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Bab ini juga memuat penjelasan umum dari program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

### **Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah**

Bab ini berisi rumusan rencana program, kegiatan dan pagu dana indikatif yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto pada Tahun Anggaran 2023 serta prakiraan maju Tahun Anggaran 2024.

### **Bab V Penutup**

Bab ini berisi uraian tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Bab ini juga memuat kaidah pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023.

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Anggaran yang tersedia untuk Perangkat Daerah pada setiap tahun anggaran di lakukan evaluasi antara anggaran dengan realisasi, dengan memperhatikan unsur ekonomis, efektif, dan efisien. Ekonomis diukur dengan masukan (*input*) anggaran dengan realisasi, sedangkan efisiensi dengan cara membandingkan antara *input* dengan *output*, dan efektifitas dengan cara membandingkan hasil (*outcome*) dengan target yang ditetapkan. Adapun ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto per tanggal 31 Desember 2022 sebesar .....% adalah sebagai berikut :

Anggaran	Rp.
Realisasi	<u>Rp.</u>
Sisa Lebih/(Kurang) Anggaran	<u>Rp.</u>

Sedangkan anggaran BPBD Kabupaten Mojokerto pada TA. 2023 adalah sebesar Rp .....,-

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto sampai dengan Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagaimana Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.1

(Tabel T-C. 29 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021  
Kabupaten Mojokerto**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (Semester 1)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
1	05									
1	05	1	05	04	26					
1	05	1	05	04	26	01				

1	05	1	05	04	26	02		Penyediaan dan Pemeliharaan Sistem Peringatan Dini pada Daerah Resiko Bencana	Jumlah sistem peringatan dini yang terpasang	-	2 unit	1 Unit	1 unit	100%	-	-	-
1	05	1	05	04	26	03		Pembentukan/ Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	Jumlah Desa Tangguh Bencana	-	7 Desa	2 Desa	2 Desa	100%	-	-	-
1	05	1	05	04	26	04		Penyebaran Informasi Bencana Alam	Jumlah informasi bencana alam yang disebarluaskan	-	8.760 kali	2.920 kali	2.920 kali	100%	-	-	-
1	05	1	05	04	26	05		Peningkatan Kapasitas SDM Penanggulangan Bencana	Jumlah SDM penanggulangan bencana yang dilatih	-	180 org	80 org	80 org	100%	-	-	-
1	05	1	05	04	26	06		Pelatihan Kader Perempuan Tangguh Bencana	Jumlah kader perempuan tangguh bencana yang dilatih	-	50 org	50 org	50 org	100%	-	-	-
1	05	1	05	04	26	07		Penguatan Sekolah dan Madrasah Aman Bencana	Jumlah sekolah dan madrasah yang dilatih	-	1 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	100%	-	-	-
1	05	1	05	04	26	08		Penguatan Rumah Sakit dan Puskesmas Aman Bencana	Jumlah rumah sakit dan puskesmas yang dilatih	-	5 lembaga	5 lembaga	0 (Refocusing)	0%	-	-	-
1	05	1	05	04	26	09		Pengembangan Forum Pengurangan Resiko Bencana (PRB)	Persentase rencana kegiatan Forum PRB yang dilaksanakan	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-

1	05	1	05	04	26	16		Penyusunan Kajian Resiko Bencana	Kajian resiko bencana	-	-	1 dok	1 dok	100%	-	-	-
1	05	1	05	04	26	11		Simulasi Penanggulangan Bencana Banjir/ Tanah Longsor/ Gempa Bumi/ Kebakaran/ Erupsi Gunung Berapi	Jumlah kegiatan simulasi penanggulangan bencana	-	3 keg	3 keg	0 (Refocusing)	0%	-	-	-
1	05	1	05	04	26			<b>Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana dan Bahaya Kebakaran</b>	<b>Persentase Kesiapsiagaan Wilayah Manajemen Kebakaran</b>	-	-	80%	28,57%	35,71%	-	-	-
1	05	1	05	04	26	12		Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Persentase kejadian kebakaran yang ditangani sesuai SOP	-	51,82%	90%	63,22%	70,24%	-	-	-
1	05	1	05	04	26	13		Operasional Pelayanan Armada Pemadam Kebakaran	Jumlah armada pemadam kebakaran yang layak operasional	-	6 unit	6 unit	6 unit	100%	-	-	-
1	05	1	05	04	26	14		Pengadaan Peralatan PMK	Jumlah peralatan pemadam kebakaran	-	11 Jenis	9 jenis	9 Jenis	100%	-	-	-
1	05	1	05	04	26	15		Peningkatan Kapasitas Personil Pemadam Kebakaran	Jumlah personil pemadam kebakaran yang dilatih	-	42 org	42 org	42 org	100%	-	-	-

1	05	1	05	04	26	xx		Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran	Mobil pemadam kebakaran	-	2 unit	1 unit	1 unit	100%	-	-	-
1	05	1	05	04	27			<b>Program Penanganan Kedaruratan dan Logistik Bencana</b>	<b>Persentase kejadian yang ditangani sesuai waktu tanggap</b>	-	-	85%	100%	117,65%	-	-	-
1	05	1	05	04	27	01		Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana	Jumlah laporan pelaksanaan Tugas Pusdalops PB	-	1.461 Lap.	365 lap	365 Lap.	100%	-	-	-
1	05	1	05	04	27	02		Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana	Jumlah sarana prasarana penanggulangan bencana	-	20 jenis	6 jenis	6 jenis	100%	-	-	-
1	05	1	05	04	27	03		Tanggap Darurat Bencana	Persentase kejadian bencana yang ditangani dalam waktu 120 menit	-	100%	80%	100%	125%	-	-	-
1	05	1	05	04	27	04		Penyediaan Bantuan Air Bersih	Jumlah bantuan air bersih	-	648 Tangki	450 Tangki	450 Tangki	100%	-	-	-
1	05	1	05	04	27	05		Operasional Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana	Persentase laporan pelaksanaan tugas TRC PB	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-
1	05	1	05	04	27	06		Pengadaan Logistik Penanggulangan Bencana	Jumlah logistik penanggulangan bencana	-	5 jenis	8 jenis	8 jenis	100%	-	-	-

1	05	1	05	04	27	07		Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Logistik Penanggulangan Bencana	Persentase sarana prasarana penanggulangan bencana yang layak operasional	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-
1	05	1	05	04	28			<b>Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana</b>	<b>Persentase penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana</b>	-	-	60%	92,86%	154,77%	-	-	-
1	05	1	05	04	28	01		Peningkatan Kapasitas Tim Human Recovery Needs Assesment (HRNA)	Jumlah anggota Tim HRNA yang dilatih	-	180 org	70 Org	70 org	100%	-	-	-
1	05	1	05	04	28	02		Peningkatan Kapasitas Tim Damage and Losses Assesment (DaLA)	Jumlah anggota Tim DaLA yang dilatih	-	250 Org	70 org	70 Org	100%	-	-	-
1	05	1	05	04	28	03		Operasional Tim Pengkajian Kebutuhan Pasca bencana (JITU PASNA)	Persentase kajian kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-
1	05	1	05	04	28	04		Penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi	-	2 dok	1 dok	1 dok	100%	-	-	-
								<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		-					-	-	-



1	05	1	05	04	01	01	06	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	-	48 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	-	-	-
1	05	1	05	04	01	01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pemeliharaan / perpanjangan perizinan kendaraan dinas / operasional	-	13 Unit	13 Unit	13 Unit	100%	-	-	-
1	05	1	05	04	01	01		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis ATK yang disediakan	-	4 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	-	-	-
1	05	1	05	04	01	01		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibutuhkan	-	14 Jenis	14 Jenis	14 Jenis	100%	-	-	-
1	05	1	05	04	01	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang dibutuhkan	-	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	100%	-	-	-
1	05	1	05	04	01	01		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan	-	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	100%	-	-	-

1	05	1	05	04	01	01		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	48 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	-	-	-
1	05	1	05	04	01	01		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman	-	48 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	-	-	-
1	05	1	05	04	01	01		Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah	Jumlah waktu pemenuhan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar dan dalam daerah	-	48 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	-	-	-
1	05	1	05	04	01	01		Penyediaan Jasa Tenaga Kerja	Jumlah penyediaan jasa tenaga kerja selama 12 bulan	-	8 Org	8 Org	8 Org	100%	-	-	-
								<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		-					-	-	-
								Pengadaan Mebeleur	Jumlah mebeleur yang dibutuhkan	-	6 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	100%	-	-	-
								Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara dan berfungsi baik	-	2 Gedung	2 gedung	2 Gedung	100%	-	-	-

								Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara dan berfungsi baik	-	13 Unit	13 Unit	13 Unit	100%	-	-	-
								Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara dan berfungsi baik	-	6 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	100%	-	-	-
								<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>		-					-	-	-
								Penyusunan Rencana Tahunan dan Laporan Kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang disusun	-	28 Dok.	7 Dok.	7 Dok.	100%	-	-	-

**Tabel 2.2**

(Tabel T-C. 29 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022  
Kabupaten Mojokerto**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output) / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Keg. s/d dengan Tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Keg. (Renja Perangkat Daerah tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (Semester 1)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Keg. s/d Tahun Berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									

1	05				<b>Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat</b>									
1	05	01			<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>			-	-	-	-			
1	05	01	2.01		<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			-	-	-	-			
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	3 dok	-	-	-	-	2 dok	1 dok	-
1	05	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja PD yang disusun	18 dok	-	-	-	-	6 dok	3 dok	-
1	05	01	2.02		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			-	-	-	-			
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	14 bulan	-	-	-	-	14 bulan	7 bulan	-
1	05	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah waktu pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	6 bulan	-
1	05	01	2.06		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			-	-	-	-			

1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan bangunan kantor yang dibeli	4 jenis	-	-	-	-	4 jenis	4 jenis	-
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	5 jenis	-	-	-	-	5 jenis	5 jenis	-
1	05	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang dibeli	10 jenis	-	-	-	-	10 jenis	10 jenis	-
1	05	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	6 bulan	-
1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang dibeli	10 jenis	-	-	-	-	10 jenis	10 jenis	-
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	6 bulan	-
1	05	01	2.06	07	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah ATK yang dibeli	1 paket	-	-	-	-	1 paket	1 paket	-
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu pemenuhan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	6 bulan	-
1	05	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			-	-	-	-			

1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang dibeli	2 jenis	-	-	-	-	2 jenis	2 jenis	-
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>01</b>	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			-	-	-	-			
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah waktu penyediaan jasa surat menyurat	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	6 bulan	-
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	6 bulan	-
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu penyediaan jasa administrasi keuangan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	6 bulan	-
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>01</b>	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			-	-	-	-			
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	16 unit	-	-	-	-	16 unit	16 unit	-
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung/kantor yang dipelihara	2 unit	-	-	-	-	2 unit	2 unit	-
1	05	01	2.09	10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah waktu pemeliharaan rutin/berkala	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	6 bulan	-





					Terhadap Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah sarana prasarana penanggulangan bencana	4 jenis	-	-	-	-	5 jenis	5 jenis	-
1	05	03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah sistem peringatan dini bencana yang terpasang	1 unit	-	-	-	-	-	-	-
1	05	03	2.02	05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah rapat koordinasi penanggulangan bencana	2 rakor	-	-	-	-	2 rakor	2 rakor	-
						Jumlah dokumen RAD Pengurangan Resiko Bencana (RAD-PRB) yg disusun	1 dok	-	-	-	-	-	-	-
1	05	03	2.02	06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Desa Tangguh Bencana yang Dibentuk / Dikembangkan	2 Desa	-	-	-	-	2 Desa	1 Desa	-
						Jumlah sekolah / madrasah yang dilatih	1 lembaga	-	-	-	-	1 lembaga	1 lembaga	-
						Jumlah rumah sakit / puskesmas yang dilatih	1 lembaga	-	-	-	-	1 lembaga	1 lembaga	-
1	05	03	2.02	07	Penanganan Pascabencana Kabupaten / Kota	Jumlah laporan kajian kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	100 lap	-	-	-	-	100 lap	50 lap	-

						Jumlah dokumen Rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi	1 dok	-	-	-	-	1 dok	-	-
1	05	03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah laporan pelaksanaan tugas TRC PB	100 laporan	-	-	-	-	100 laporan	50 laporan	-
1	05	03	2.02	09	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah dokumen Rencana Kontinjensi	1 dok	-	-	-	-	-	-	-
1	05	03	2.02	10	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah kegiatan gladi kesiapsiagaan bencana	2 keg	-	-	-	-	-	-	-
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>03</b>	<b>2.03</b>		<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>			-	-	-	-			
1	05	03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah bantuan air bersih	600 tangki	-	-	-	-	590 tangki	-	-
1	05	03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah kejadian bencana yang ditangani dalam waktu 120 menit	100 kejadian	-	-	-	-	100 kejadian	50 kejadian	-
1	05	03	2.03	04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan	Jumlah logistik penanggulangan bencana	7 jenis	-	-	-	-	7 jenis	7 jenis	-

					Evakuasi Korban Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah sarana prasarana penanggulangan bencana yang dipelihara	11 jenis	-	-	-	-	11 jenis	11 jenis	-
1	05	03	2.03	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah kegiatan aktivasi komando penanganan darurat bencana	2 keg	-	-	-	-	-	-	-
1	05	03	2.03	06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik / Wabah Penyakit	Jumlah kegiatan respon cepat bencana non alam epidemik / wabah penyakit	5 keg	-	-	-	-	-	-	-
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>03</b>	<b>2.04</b>		<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>			-	-	-	-			
1	05	03	2.04	01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah regulasi penanggulangan bencana yang disusun	1 dok	-	-	-	-	-	-	-
1	05	03	2.04	02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten / Kota	Jumlah laporan kegiatan Forum PRB	2 lap	-	-	-	-	2 lap	1 lap	-
1	05	03	2.04	03	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga kemitraan penanggulangan bencana	25 lembaga	-	-	-	-	-	-	-
1	05	03	2.04	04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah sistem informasi kebencanaan yang dikelola	2 aplikasi	-	-	-	-	-	-	-

1	05	04			<b>Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</b>			-	-	-	-			
1	05	04	2.01		<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota</b>			-	-	-	-			
1	05	04	2.01	01	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Kajian Resiko Kebakaran dan Penyelamatan yang disusun	1 dok	-	-	-	-	-	-	-
1	05	04	2.01	02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah armada pemadam kebakaran yang layak operasional	7 unit	-	-	-	-	7 unit	7 unit	-
						Jumlah kejadian kebakaran yang ditangani sesuai waktu tanggap	100 kejadian	-	-	-	-	100 kejadian	50 kejadian	-
1	05	04	2.01	03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	100 kejadian	-	-	-	-	100 kejadian	50 kejadian	-

1	05	04	2.01	04	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran	4 keg	-	-	-	-	-	-	-
1	05	04	2.01	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah peralatan pemadam kebakaran yang dibeli	5 jenis	-	-	-	-	-	-	-
						Jumlah mobil pemadam kebakaran yang dibeli	1 unit	-	-	-	-	-	-	-
1	05	04	2.01	07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang dibina	37 org	-	-	-	-	-	-	-
1	05	04	2.01	08	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah sistem komunikasi dan informasi kebakaran dan penyelamatan yang dikelola	1 aplikasi	-	-	-	-	-	-	-
1	05	04	2.01	09	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Daerah/Lembaga kemitraan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	10 Daerah / lembaga	-	-	-	-	-	-	-
1	05	04	2.02		<b>Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</b>			-	-	-	-			

1	05	04	2.02	01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah lembaga yang diinspeksi	25 lembaga	-	-	-	-	25 lembaga	25 lembaga	-
<b>1</b>	<b>05</b>	<b>04</b>	<b>2.04</b>		<b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>			-	-	-	-			
1	05	04	2.04	01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah kegiatan sosialisasi pencegahan kebakaran	4 keg	-	-	-	-	2 keg	1 keg	-
1	05	04	2.04	02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah organisasi relawan pemadam kebakaran wilayah yang dibentuk	4 organisasi	-	-	-	-	-	-	-
1	05	04	2.04	03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang diberikan kepada masyarakat	2 jenis	-	-	-	-	-	-	-

## **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto, BPBD Kabupaten Mojokerto memiliki peran koordinasi, komando dan pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, penanganan darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi secara adil dan setara.

Pemantapan koordinasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan diarahkan untuk mengkoordinasikan seluruh upaya pengurangan resiko bencana dalam berbagai sektor pembangunan sesuai agenda pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Mojokerto 2021 – 2026. Koordinasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan menekankan pada integrasi dimensi pengurangan resiko bencana baik dalam pembangunan struktural maupun non-struktural sebagai bentuk investasi yang diprioritaskan pada kawasan pertumbuhan ekonomi daerah yang memiliki tingkat resiko bencana tinggi.

Pemantapan koordinasi di bidang penanganan darurat bencana diarahkan untuk membangun sistem komando dan mobilisasi sumberdaya penanganan darurat bencana yang cepat dan handal, disertai dengan kemampuan anggaran sejak keadaan siaga darurat sampai dengan transisi darurat. Selain itu juga diperlukan pembangunan sistem penyediaan, distribusi serta tata kelola peralatan dan logistik penanggulangan bencana yang berdasarkan pada kebutuhan dan standar minimal.

Pemantapan koordinasi di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana diarahkan pada pengerahan sumberdaya bagi percepatan penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana sesuai amanat agenda pembangunan daerah.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan BPBD Kabupaten Mojokerto adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.3**

(Tabel T-C. 30 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Mojokerto**

No.	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020 (n-2)	Tahun 2021 (n-1) (Semester 1)	Tahun 2022 (n)	Tahun 2023 (n+1)	Tahun 2020 (n-2)	Tahun 2021 (n-1) (Semester 1)	Tahun 2022 (n)	Tahun 2023 (n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Kerentanan	-	-	6,94	6,25	-	-	6,96	-	-	-	Mulai TA. 2022 Indeks Kerentanan tidak digunakan lagi sebagai indikator kinerja BPBD
2	Indeks Kapasitas	-	-	11,3	12	-	-	11,67	-	-	-	Mulai TA. 2022 Indeks Kapasitas tidak digunakan lagi sebagai indikator kinerja BPBD
3	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)	-	-	-	-	0,788	0,806	-	-	0,788	0,806	Indeks Kapasitas Daerah (IKD) mulai digunakan sebagai indikator kinerja sasaran strategis BPBD pada TA. 2022



4	Persentase Pemenuhan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	-	-	-	-	42,86%	42,86%	-	-	42,86%	42,86%	Persentase Pemenuhan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) indikator kinerja sasaran strategis BPBD pada TA. 2022
5	Persentase Penyelesaian dokumen Kajian Resiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah / legal	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Indikator pada SPM Sub Urusan Bencana berdasarkan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018
6	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi sesuai jenis ancaman bencana	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator pada SPM Sub Urusan Bencana berdasarkan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018
7	Persentase penyelesaian dokumen Rencana Penanggulangan Bencana sampai dinyatakan sah / legal	100%	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	Indikator pada SPM Sub Urusan Bencana berdasarkan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018
8	Persentase penyelesaian dokumen Rencana Kontinjensi sampai dinyatakan sah / legal	100%	-	-	-	100%	-	-	-	-	-	Indikator pada SPM Sub Urusan Bencana berdasarkan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018
9	Persentase jumlah aparatur dan warga di daerah rawan bencana yang mengikuti pelatihan bencana	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator pada SPM Sub Urusan Bencana berdasarkan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018

10	Persentase jumlah warga di daerah rawan bencana yang mengikuti gladi kesiapsiagaan bencana	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator pada SPM Sub Urusan Bencana berdasarkan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018
11	Persentase jumlah warga di daerah rawan bencana yang mendapat layanan Pusdalops dan sarana prasarana penanggulangan bencana	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator pada SPM Sub Urusan Bencana berdasarkan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018
12	Persentase jumlah warga di daerah rawan bencana yang mendapat peralatan perlindungan terhadap bencana	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator pada SPM Sub Urusan Bencana berdasarkan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018
13	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status Kejadian Luar Biasa (KLB)	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator pada SPM Sub Urusan Bencana berdasarkan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018
14	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator pada SPM Sub Urusan Bencana berdasarkan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018
15	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator pada SPM Sub Urusan Bencana berdasarkan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018

16	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi pada saat kejadian bencana	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator pada SPM Sub Urusan Bencana berdasarkan Permendagri Nomor 101 Tahun 2018
17	Persentase layanan pemadaman kebakaran, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	-	100%	100%	100%	100%	58,86%	100%	100%	100%	Indikator pada SPM Sub Urusan Kebakaran berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2018
18	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi non kebakaran)	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator pada SPM Sub Urusan Kebakaran berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2018

### 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

1. Penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum.
2. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana.
3. Pengurangan resiko bencana dan pemaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan.
4. Pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang memadai.

Sesuai dengan ketentuan pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana bertujuan untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko dan dampak bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut meliputi tahap pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Adapun faktor-faktor penghambat pencapaian kinerja yang dihadapi BPBD Kabupaten Mojokerto berdasarkan tugas dan fungsinya saat ini adalah sebagai berikut :

1. Belum terbentuknya desa tangguh bencana di seluruh daerah rawan bencana.
2. Belum tersedianya sistem peringatan dini / Early Warning System (EWS) yang mencukupi dan terintegrasi.
3. Belum optimalnya penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran.
4. Belum tersedianya rencana kontinjensi per jenis bencana yang terintegrasi dan komprehensif.
5. Pos pemadam kebakaran yang dimiliki BPBD Kabupaten Mojokerto saat ini hanya berada di 2 lokasi (Kec. Mojosari dan Kec. Mojoanyar) yang harus melayani seluruh wilayah Kabupaten Mojokerto dengan luas 692,15 km<sup>2</sup>.

Berdasarkan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Kabupaten Mojokerto, minimal ada 7 (tujuh) pos pemadam kebakaran yang menjadi prioritas pembangunan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kabupaten Mojokerto untuk dapat memenuhi waktu tanggap 15 menit dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Kebakaran sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah kabupaten/Kota.

6. Armada pemadam kebakaran yang dimiliki masih belum mencukupi (hanya memiliki 7 armada). Dari jumlah tersebut 2 unit diantaranya tidak dapat berfungsi. Jumlah armada yang dibutuhkan menyesuaikan dengan jumlah pos pemadam kebakaran / WMK yang ada. Sehingga jika seharusnya terdapat 7 pos pemadam kebakaran / WMK maka jumlah armada yang harus dimiliki sebanyak 14 unit.
7. Jumlah personil pemadam kebakaran yang dimiliki masih belum sesuai standar, baik dari jumlah maupun kompetensi. Saat ini BPBD Kabupaten Mojokerto hanya memiliki 38 personil dan hanya 4 personil yang telah memiliki sertifikasi kompetensi Pemadam Tingkat 1. Sedangkan jumlah personil pemadam kebakaran yang harus dimiliki adalah sebanyak 21 orang pada setiap pos.
8. Peralatan pemadam kebakaran yang dimiliki masih belum mencukupi.

Sedangkan isu-isu strategis penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran di Kabupaten Mojokerto saat ini adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan sistem peringatan dini bencana / Early Warning System (EWS) yang mencukupi dan terintegrasi.
2. Pemenuhan layanan pemadaman kebakaran yang sesuai dengan waktu tanggap (*response time*) 15 menit.
3. Sertifikasi keahlian/kompetensi sumber daya manusia penanggulangan bencana dan kebakaran.
4. Penanganan infrastruktur rusak karena bencana yang bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten Mojokerto tapi berdampak pada masyarakat Kabupaten Mojokerto.
5. Pengurangan resiko bencana melalui peningkatan kapasitas, penguatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

#### **2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD.**

Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan BPBD Kabupaten Mojokerto pada TA. 2023 adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 2.4**

(Tabel T-C. 31 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)  
**Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun Anggaran 2023**  
**Kabupaten Mojokerto**

**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Program/ Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPBD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,90		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	BPBD	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,90		
2.	Program Penanggulangan Bencana	Kab. Mojokerto	Persentase kesiapsiagaan dan pengurangan resiko bencana	20%		Program Penanggulangan Bencana	Kab. Mojokerto	Persentase kesiapsiagaan dan pengurangan resiko bencana	20%		
			Persentase penanganan darurat bencana sesuai waktu tanggap	100%				Persentase penanganan darurat bencana sesuai waktu tanggap	100%		

			Persentase penyelesaian penanganan pasca bencana	65%				Persentase penyelesaian penanganan pasca bencana	65%		
3.	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kab. Mojokerto	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sesuai waktu tanggap	100%		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kab. Mojokerto	Persentase layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sesuai waktu tanggap	100%		
			Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi non kebakaran)	100%				Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi non kebakaran)	100%		
<b>TOTAL</b>						<b>TOTAL</b>					

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran di wilayah Kabupaten Mojokerto terdapat 5 pemangku kepentingan yang saling mendukung, yaitu Pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi dan jurnalis. Sehingga setiap pemangku kepentingan dapat mengusulkan program dan kegiatan penanggulangan bencana dan kebakaran dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Mojokerto setiap tahunnya. Berikut ini usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan masyarakat, dunia usaha, akademisi, jurnalis, serta pokok pikiran DPRD Kabupaten Mojoekrto yang masuk dalam Musrenbang Kabupaten Mojokerto TA. 2022 :

**Tabel 2.5**  
(Tabel T-C. 32 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan TA. 2023**  
**Kabupaten Mojokerto**

### Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No.	Program/Keg.	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6



## BAB III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Indonesia menjadi salah satu negara yang berkomitmen melaksanakan Kerangka Kerja Sendai (*Sendai Framework for Disaster Risk Reduction*) yang telah menjadi kesepakatan dalam *World Conference for Disaster Risk Reduction* di Sendai pada tahun 2015. Prioritas dalam kerangka kerja ini adalah :

1. Pemahaman resiko dasar bencana.
2. Penguatan tata kelola resiko bencana dalam pengelolaan resiko bencana.
3. Investasi dalam pengurangan resiko bencana untuk ketangguhan.
4. Meningkatkan kesiapsiagaan bencana untuk respon yang efektif dan untuk **“Membangun Kembali Lebih Baik”** dalam masa pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024. Sasaran utama dalam RPJMN 2020 – 2024 adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di ebrbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Untuk dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan demi mencapai masyarakat Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong, dibutuhkan masyarakat Indonesia yang tangguh bencana. Indonesia tangguh bencana adalah Indonesia yang seluruh elemennya mulai dari bagian terkecil pada tingkat keluarga dan Desa hingga Pemerintah Daerah dan Pemerintah, memiliki kesadaran terhadap risiko bencana, memiliki pengetahuan dan keterampilan terkait manajemen penanggulangan bencana dan berketahanan dalam menghadapi keadaan darurat bencana serta mampu pulih menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan pada pasca bencana.

Manajemen organisasi dan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mojokerto yang memiliki peran koordinasi, komando dan pelaksana dalam penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Mojokerto juga harus menyesuaikan perubahan paradigma dalam penanggulangan bencana dari reaktif menjadi proaktif, dan dari penanganan darurat menjadi pencegahan, serta senantiasa mendukung peningkatan pertumbuhan dan kemandirian ekonomi di wilayah Kabupaten Mojokerto melalui upaya-upaya :

1. Peningkatan kesadaran dan pemahaman terhadap pengurangan resiko bencana.
2. Menumbuhkembangkan kemampuan antisipasi, adaptasi, daya proteksi, menghindari/meminimalisir dampak bencana, serta memiliki daya serap informasi.
3. Peningkatan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana dan masyarakat.
4. Mendorong partisipasi dan peran aktif dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
5. Pengintegrasian sistem peringatan dini dan penyebarluasan peringatan dini bencana.
6. Peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.**

Tujuan Perangkat Daerah adalah penjabaran atau implementasi dari Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 2021 – 2026, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Adapun tujuan BPBD Kabupaten Mojokerto selama kurun waktu adalah 2021 – 2026 adalah :

#### **1. Meningkatkan Pencegahan dan Penanggulangan Bencana.**

Indikator tujuan BPBD Kabupaten Mojokerto adalah :

##### **1. Indeks Resiko Bencana** dengan target kinerja pada TA. 2023 sebesar **114,67**.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang diukur dengan jelas, terintegrasi, terkoordinasi dan konsisten yang akan dicapai dalam kurun waktu 2021 – 2026. Sasaran BPBD Kabupaten Mojokerto adalah :

##### **1. Meningkatnya Ketangguhan Terhadap Bencana dan Bahaya Kebakaran**

Indikator sasaran BPBD Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

##### **1. Persentase Pemenuhan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK).**

Dengan target kinerja pada TA. 2023 sebesar 42,86%.

##### **2. Indeks Kapasitas Daerah (IKD).**

Dengan target kinerja pada TA. 2023 sebesar 0,788.

### **3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.**

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga penanggulangan bencana tersebut, BPBD Kabupaten Mojokerto menetapkan program-programnya sesuai RPJMD Pemerintah Kabupaten Mojokerto periode 2021 – 2026 dan RKPD Pemerintah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BPBD Kabupaten Mojokerto pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

**1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**

- 1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
  - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
  - b. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
  - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.
  - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
  - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
  - b. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah.
  - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
  - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
  - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
  - d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
  - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
  - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.
  - g. Penyediaan Bahan/Material.
  - h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
  - a. Pengadaan Mebel.
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
  - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
  - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
  - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
  - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

## **2. Program Penanggulangan Bencana.**

- 1) Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota.
  - a. Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota.
  - b. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana).
- 2) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana.
  - a. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota.
  - b. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota.
  - c. Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana.
  - d. Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota.
  - e. Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
  - f. Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota.
  - g. Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota.
  - h. Penyusunan Rencana Kontinjensi.
  - i. Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana.
- 3) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.
  - a. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota.
  - b. Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota.
  - c. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota.
  - d. Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.
  - e. Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemik / Wabah Penyakit.
- 4) Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana.
  - a. Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota.
  - b. Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota.
  - c. Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota.
  - d. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan.

## **3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.**

- 1) Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.
  - a. Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.

- b. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.
  - c. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran.
  - d. Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota.
  - e. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri.
  - f. Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran.
  - g. Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK).
  - h. Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.
- 2) Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran.
- a. Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran.
- 3) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran.
- a. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat.
  - b. Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran.
  - c. Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana.

**Tabel 3.1**  
**(Tabel T-C. 33 dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017)**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023**  
**dan Prakiraan Maju Rencana Tahun Anggaran 2024**  
**Kabupaten Mojokerto**

No.	KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	UP	B/L	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2023 (TAHUN RENCANA)				CATA TAN PENTI NG	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
					OUTPUT SUB KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	OUTCOME PROGRAM	TARGET	LOKASI	PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT												
	04.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH												
	<b>1.05.01</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>					<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>84,30 (A)</b>	BPBD KAB. MOJOKERTO	<b>7.562.874.885</b>	APBD		<b>85 (A)</b>	9.075.449.862
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							BPBD KAB. MOJOKERTO	26.750.000	APBD			32.100.000
	1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang Disusun		4 dokumen	BPBD KAB. MOJOKERTO	10.700.000	APBD		4 dokumen	12.840.000
	1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja PD yang Disusun		7 dokumen	BPBD KAB. MOJOKERTO	16.050.000	APBD		7 dokumen	19.260.000

1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								BPBD KAB. MOJOKERTO	6.146.024.885	APBD			7.375.229.862
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS					Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		14 kali	BPBD KAB. MOJOKERTO	6.129.974.885	APBD		14 kali	7.355.969.862
1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					Jumlah Waktu Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan		12 bulan	BPBD KAB. MOJOKERTO	16.050.000	APBD		12 bulan	19.260.000
1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								BPBD KAB. MOJOKERTO	55.500.000	APBD			66.600.000
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					Jumlah Pakaian Dinas yang Dibeli		50 stel	BPBD KAB. MOJOKERTO	50.000.000	APBD		50 stel	60.000.000
1.05.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					Jumlah Laporan Kepegawaian PD yang Disusun		19 laporan	BPBD KAB. MOJOKERTO	5.500.000	APBD		19 laporan	6.600.000
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								BPBD KAB. MOJOKERTO	394.900.000	APBD			473.880.000
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor					Jumlah komponen Listrik / penerangan bangunan Kantor yang Dibeli		4 jenis	BPBD KAB. MOJOKERTO	12.500.000	APBD		4 jenis	15.000.000
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dibeli		5 jenis	BPBD KAB. MOJOKERTO	80.250.000	APBD		5 jenis	96.300.000
1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Dibeli		10 jenis	BPBD KAB. MOJOKERTO	10.700.000	APBD		10 jenis	12.840.000

1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Jumlah Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan	BPBD KAB. MOJOKERTO	53.500.000	APBD	12 bulan	64.200.000
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Dibeli	10 jenis	BPBD KAB. MOJOKERTO	37.450.000	APBD	10 jenis	44.940.000
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan					Jumlah Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 bulan	BPBD KAB. MOJOKERTO	7.500.000	APBD	12 bulan	9.000.000
1.05.01.2.06.07	Penyediaan Bahan / Material					Jumlah ATK yang Dibeli	1 paket	BPBD KAB. MOJOKERTO	53.500.000	APBD	1 paket	64.200.000
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					Jumlah Waktu Pemenuhan Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan	BPBD KAB. MOJOKERTO	139.500.000	APBD	12 bulan	167.400.000
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							BPBD KAB. MOJOKERTO	32.500.000	APBD		39.000.000
1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel					Jumlah Mebeleur yang Dibeli	2 jenis	BPBD KAB. MOJOKERTO	32.500.000	APBD	2 jenis	39.000.000
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							BPBD KAB. MOJOKERTO	353.700.000	APBD		424.440.000
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan	BPBD KAB. MOJOKERTO	5.350.000	APBD	12 bulan	6.420.000
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	BPBD KAB. MOJOKERTO	182.500.000	APBD	12 bulan	219.000.000



1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		12 bulan	BPBD KAB. MOJOKERTO	165.850.000	APBD		12 bulan	199.020.000
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								BPBD KAB. MOJOKERTO	553.500.000	APBD			664.200.000
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang Dipelihara		16 unit	BPBD KAB. MOJOKERTO	321.000.000	APBD		16 unit	385.200.000
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Jumlah Gedung / Kantor yang Dipelihara		2 unit	BPBD KAB. MOJOKERTO	200.000.000	APBD		2 unit	240.000.000
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					Jumlah Waktu Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		12 bulan	BPBD KAB. MOJOKERTO	32.500.000	APBD		12 bulan	39.000.000
1.05.01.2.13	Penataan Organisasi								BPBD KAB. MOJOKERTO		APBD			-
1.05.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Harap pindahkan ke referensi baru					jumlah peningkatan kinerja yang dilaksanakan		1 kegiatan	BPBD KAB. MOJOKERTO	300.000.000	APBD		1 kegiatan	360.000.000
1.05.03	<b>Program Penanggulangan Bencana</b>								BPBD KAB. MOJOKERTO	<b>3.443.000.000</b>	APBD			4.131.600.000
						Persentase kesiapsiagaan dan pengurangan resiko bencana		30%	BPBD KAB. MOJOKERTO		APBD		30%	-
						Persentase penanganan darurat bencana		100%	BPBD KAB. MOJOKERTO		APBD		100%	-

							sesuai waktu tanggap						
							Persentase penyelesaian penanganan pasca bencana	65%	BPBD KAB. MOJOKERTO		APBD	65%	-
1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota								BPBD KAB. MOJOKERTO	175.000.000	APBD		210.000.000
1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota					Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi		1 Dokumen	BPBD KAB. MOJOKERTO	50.000.000	APBD	1 Dokumen	60.000.000
1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)					Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya		150 Orang	BPBD KAB. MOJOKERTO	50.000.000	APBD	150 Orang	60.000.000
1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan								BPBD KAB. MOJOKERTO	2.025.000.000	APBD		2.430.000.000

		Kesiapsiagaan Terhadap Bencana													
	1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota					Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana		50 Orang	BPBD KAB. MOJOKERTO	100.000.000	APBD		50 Orang	120.000.000
	1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota					Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		365 Laporan, 4 Jenis	BPBD KAB. MOJOKERTO	400.000.000	APBD		365 Laporan, 4 Jenis	480.000.000
	1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas		1 Unit, 5 alat	BPBD KAB. MOJOKERTO	350.000.000	APBD		1 Unit, 5 alat	420.000.000

	1.05.03.2.02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota					Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana		5 Dokumen	BPBD KAB. MOJOKERTO	100.000.000	APBD		5 Dokumen	120.000.000
	1.05.03.2.02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan					Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana		4 Titik	BPBD KAB. MOJOKERTO	250.000.000	APBD		4 Titik	300.000.000
	1.05.03.2.02.07	PENANGANAN PASCA BENCANA KABUPATEN/KOTA					JUMLAH ANGGOTA TIM YANG DILATIH, JUMLAH LAPORAN KAJIAN KEBUTUHAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA, JUMLAH DOKUMEN RENCANA AKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI, JUMLAH KEJADIAN BENCANA YANG DITANGANI		50 ORANG, 60 LAPORAN, 1 DOKUMEN	BPBD KAB. MOJOKERTO	300.000.000	APBD		50 ORANG, 60 LAPORAN, 1 DOKUMEN	360.000.000

1.05.03.2.02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota					Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya		180 Laporan	BPBD KAB. MOJOKERTO	150.000.000	APBD		180 Laporan	180.000.000
1.05.03.2.02.09	Penyusunan Rencana Kontinjensi					Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi		1 Dokumen	BPBD KAB. MOJOKERTO	100.000.000	APBD		1 Dokumen	120.000.000
1.05.03.2.02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan		2 Kali	BPBD KAB. MOJOKERTO	150.000.000	APBD		2 Kali	180.000.000
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		5 Keluarga	BPBD KAB. MOJOKERTO	50.000.000	APBD		5 Keluarga	60.000.000
1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana								BPBD KAB. MOJOKERTO	943.000.000	APBD			1.131.600.000
1.05.03.2.03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota					SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat		4 Desa	BPBD KAB. MOJOKERTO	240.750.000	APBD		4 Desa	288.900.000

1.05.03.2.03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota					Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana		180 Kejadian	BPBD KAB. MOJOKERTO	215.000.000	APBD	180 Kejadian	258.000.000
1.05.03.2.03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota					Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		5 Jenis	BPBD KAB. MOJOKERTO	175.000.000	APBD	5 Jenis	210.000.000
1.05.03.2.03.05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana					Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana		2 Musim	BPBD KAB. MOJOKERTO	200.000.000	APBD	2 Musim	240.000.000
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana								BPBD KAB. MOJOKERTO	300.000.000	APBD		360.000.000
1.05.03.2.04.01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota					Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah		5 Dokumen	BPBD KAB. MOJOKERTO	350.000.000	APBD	5 Dokumen	420.000.000
1.05.03.2.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota					Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah		5 Dokumen	BPBD KAB. MOJOKERTO	250.000.000	APBD	5 Dokumen	300.000.000

1.05.03.2.04.03	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota					Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana		5 Dokumen	BPBD KAB. MOJOKERTO	25.000.000	APBD	5 Dokumen	30.000.000
1.05.03.2.04.04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan					Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan		7 Informasi	BPBD KAB. MOJOKERTO	100.000.000	APBD	7 Informasi	120.000.000
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		5 Keluarga	BPBD KAB. MOJOKERTO	50.000.000	APBD	5 Keluarga	60.000.000
1.05.04	<b>Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</b>								BPBD KAB. MOJOKERTO	<b>1.488.370.000</b>	APBD		1.786.044.000
							Persentase layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sesuai waktu tanggap	100%	BPBD KAB. MOJOKERTO		APBD	100%	-
							Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahay	100%	BPBD KAB. MOJOKERTO		APBD	100%	-

							akan manusia (operasi non kebakaran)						
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota								BPBD KAB. MOJOKERTO	1.463.370.000	APBD		1.756.044.000
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		12 Laporan	BPBD KAB. MOJOKERTO	500.000.000	APBD	12 Laporan	600.000.000
1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/ Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran		120 Dokumen	BPBD KAB. MOJOKERTO	900.000.000	APBD	120 Dokumen	1.080.000.000



1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri					Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait		40 Unit	BPBD KAB. MOJOKERTO	500.000.000	APBD		40 Unit	600.000.000
1.05.04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran					Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran		15 Orang	BPBD KAB. MOJOKERTO	150.000.000	APBD		15 Orang	180.000.000
1.05.04.2.01.09	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran					Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran		3 Dokumen	BPBD KAB. MOJOKERTO	30.000.000	APBD		3 Dokumen	36.000.000

	1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran							BPBD KAB. MOJOKERTO	25.000.000	APBD			30.000.000
	1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran					Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	70 Dokumen	BPBD KAB. MOJOKERTO	70.000.000	APBD		70 Dokumen	84.000.000
		Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran					Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	70 Dokumen	BPBD KAB. MOJOKERTO	70.000.000	APBD		70 Dokumen	84.000.000
	1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran							BPBD KAB. MOJOKERTO	-	APBD			
	1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat					Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	60 Orang	BPBD KAB. MOJOKERTO	60.000.000	APBD		60 Orang	72.000.000

	1.05.04.2.04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran				Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya		2 Desa	BPBD KAB. MOJOKERTO	60.000.000	APBD		2 Desa	72.000.000
	1.05.04.2.04.03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana				Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Saprass Damkar		5 Dokumen	BPBD KAB. MOJOKERTO	50.000.000	APBD		5 Dokumen	60.000.000

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan BPBD Kabupaten Mojokerto pada TA. 2023 adalah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 4.1**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023**  
**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**  
**Kabupaten Mojokerto**

No	KODE	PROGRAM / KEGIATAN /	U/P	B/L	INDIKATOR KINERJA		TARGET	LOKASI	APBD KAB	APBD PROV		USULAN APBN		
		SUB KEGIATAN			OUTPUT	OUTCOME			(Rp)	SKPD TERKAIT	PAGU (Rp)	KL	Rp	D/TB/DAK
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT												
	04.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH												
	<b>1.05.01</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota</b>				<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>84,30 (A)</b>		<b>7.562.874.885</b>					
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							26.750.000					
	1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan PD yang Disusun		4 dokumen		10.700.000					
	1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja PD yang Disusun		7 dokumen		16.050.000					
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							6.146.024.885					
	1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS			Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		14 kali		6.129.974.885					
	1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Jumlah Waktu Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan		12 bulan		16.050.000					
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							55.500.000					
	1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			Jumlah Pakaian Dinas yang Dibeli		50 stel		50.000.000					
	1.05.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian			Jumlah Laporan Kepegawaian PD yang Disusun		19 laporan		5.500.000					
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							394.900.000					
	1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah komponen Listrik / penerangan bangunan Kantor yang Dibeli		4 jenis		12.500.000					
	1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Dibeli		5 jenis		80.250.000					

1.05.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Dibeli	10 jenis		10.700.000						
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Waktu Penyediaan Makanan dan Minuman	12 bulan		53.500.000						
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang Dibeli	10 jenis		37.450.000						
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 bulan		7.500.000						
1.05.01.2.06.07	Penyediaan Bahan / Material		Jumlah ATK yang Dibeli	1 paket		53.500.000						
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Waktu Pemenuhan Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 bulan		139.500.000						
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					32.500.000						
1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebeleur yang Dibeli	2 jenis		32.500.000						
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					353.700.000						
1.05.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 bulan		5.350.000						
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan		182.500.000						
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	12 bulan		165.850.000						
1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					553.500.000						
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang Dipelihara	16 unit		321.000.000						
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung / Kantor yang Dipelihara	2 unit		200.000.000						
1.05.01.2.09.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Waktu Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	12 bulan		32.500.000						
1.05.01.2.13	Penataan Organisasi											
1.05.01.2.13.03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi Harap pindahkan ke referensi baru		jumlah peningkatan kinerja yang dilaksanakan	1 kegiatan		300.000.000						

	<b>1.05.03</b>	<b>Program Penanggulangan Bencana</b>						<b>3.443.000.000</b>					
						Persentase kesiapsiagaan dan pengurangan resiko bencana	30%						
						Persentase penanganan darurat bencana sesuai waktu tanggap	100%						
						Persentase penyelesaian penanganan pasca bencana	65%						
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten / Kota						175.000.000					
	1.05.03.2.01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi		1 Dokumen	50.000.000					
	1.05.03.2.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)			Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya		150 Orang	50.000.000					
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						2.025.000.000					
	1.05.03.2.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota			Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana		50 Orang	100.000.000					
	1.05.03.2.02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		365 Laporan, 4 Jenis	400.000.000					
	1.05.03.2.02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas		1 Unit, 5 alat	350.000.000					

1.05.03.2. 02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana	5 Dokumen		100.000.000						
1.05.03.2. 02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan		Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	4 Titik		250.000.000						
1.05.03.2. 02.07	PENANGANAN PASCA BENCANA KABUPATEN/KOTA		JUMLAH ANGGOTA TIM YANG DILATIH, JUMLAH LAPORAN KAJIAN KEBUTUHAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA, JUMLAH DOKUMEN RENCANA AKSI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI, JUMLAH KEJADIAN BENCANA YANG DITANGANI	50 ORANG, 60 LAPORAN, 1 DOKUMEN		300.000.000						
1.05.03.2. 02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	180 Laporan		150.000.000						
1.05.03.2. 02.09	Penyusunan Rencana Kontinjensi		Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	1 Dokumen		100.000.000						
1.05.03.2. 02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	2 Kali		150.000.000						
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	5 Keluarga		50.000.000						
1.05.03.2. 03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					943.000.000						
1.05.03.2. 03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota		SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	4 Desa		240.750.000						
1.05.03.2. 03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	180 Kejadian		215.000.000						
1.05.03.2. 03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	5 Jenis		175.000.000						



1.05.03.2.03.05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	2 Musim		200.000.000					
1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana						300.000.000					
1.05.03.2.04.01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	5 Dokumen		350.000.000					
1.05.03.2.04.02	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	5 Dokumen		250.000.000					
1.05.03.2.04.03	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	5 Dokumen		25.000.000					
1.05.03.2.04.04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan			Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan	7 Informasi		100.000.000					
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	5 Keluarga		50.000.000					
<b>1.05.04</b>	<b>Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</b>						<b>1.488.370.000</b>					
				<b>Persentase layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sesuai waktu tanggap</b>	<b>100%</b>							
				<b>Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi non kebakaran)</b>	<b>100%</b>							
1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota						1.463.370.000					
1.05.04.2.01.02	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12 Laporan		500.000.000					
1.05.04.2.01.03	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat	120 Dokumen		900.000.000					

				Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran									
1.05.04.2.01.06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	40 Unit		500.000.000						
1.05.04.2.01.07	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	15 Orang		150.000.000						
1.05.04.2.01.09	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	3 Dokumen		30.000.000						
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran						25.000.000						
1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	70 Dokumen		70.000.000						
	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	70 Dokumen		70.000.000						
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran						-						
1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	60 Orang		60.000.000						
1.05.04.2.04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran			Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan	2 Desa		60.000.000						

				Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya									
	1.05.04.2. 04.03	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana		Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar		5 Dokumen		50.000.000					

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2022 memuat visi, misi, arah kebijakan serta indikator rencana program sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto yaitu melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto ini merupakan dokumen perencanaan yang diharapkan dapat memberikan arahan untuk memudahkan pengukuran serta pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto ini disusun sebagai suatu proses yang berkesinambungan dengan menggunakan data dan informasi yang akurat, sebagai bahan-bahan dalam penentuan kebijakan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan.

#### **5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan.**

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Rencana Kerja ini merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kebutuhan Anggaran (RKA) yang selanjutnya dilaksanakan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan BPBD Kabupaten Mojokerto.
2. Program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu anggaran harus berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mojokerto.
3. Target capaian indikator kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rencana Kerja ini dapat dilakukan perubahan seperlunya, menyesuaikan dengan pagu anggaran yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2023.

KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN MOJOKERTO



**Drs. YO'IE AFRIDA SOESETYO DJATI,SH,M.Si.**

Pembina Utama Muda  
NIP: 19680207 198809 1 001